BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 36 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance) perlu dilakukan pengukuran peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu diteteapkan Indikator Kinerja Utama tahun 2017-2022 yang diatur dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Tara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;

OPD | KABAG HUKUM

5. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;

6. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan;

7. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat;

8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program;

9. Keluaran (output) adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan;

10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

IKU Tahun 2017-2022 bertujuan untuk:
a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Penjelasan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

(1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

OPD | KABAG HUKUM

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Juli 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 17 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 36

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Bappeda	
5	B. adan Pemberdayaan	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 36 TAHUN 2018
TANGGAL : 17 Juli 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 -2022

MISI I : Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET					KETERANGAN / KRITERIA
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Tersedianya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dengan kondisi mantap	%	$\frac{\text{Panjang Jalan Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Panjang Jalan di LB}} \times 100\%$	Dinas PUPR	55,50	62,00	68,00	74,00	80,00	Kriteria kondisi jalan adalah bahwa setiap ruas jalan harus memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai hagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman, dan nyaman (PERMEN PU NO. 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
		Persentase jembatan dengan kondisi mantap	%	$\frac{\text{Jumlah Jembatan Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Jembatan di LB}} \times 100\%$	Dinas PUPR	75,22	78,22	81,22	84,22	87,22	
2.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase desa yang terhubung dengan moda Transportas	%	$\frac{\text{Jumlah Desa yg Sudah Terhubung}}{\text{Jumlah Desa di LB}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan	32,35	33,82	35,29	36,76	38,24	
		Persentase desa yang terhubung dengan jangkauan telekomunikasi dan internet	%	$\frac{\text{Jumlah Desa yg Sudah Terhubung}}{\text{Jumlah Desa di LB}} \times 100\%$	Dinas Kominfo	97,79	97,79	97,79	97,79	97,79	
		Persentase desa yang dialiri listrik	%	$\frac{\text{Jumlah Desa yg Sudah Teraliri}}{\text{Jumlah Desa di LB}} \times 100\%$	Sekretariat Daerah	86,03	89,71	93,38	97,06	100,00	
3.	Tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi	%	$\frac{\text{Jumlah Irigasi yang berfungsi}}{\text{Jumlah Irigasi di LB}} \times 100\%$	Dinas PUPR	45	49	53	56	60	

OPD KABAG HUKUM

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET					KETERANGAN / KRITERIA
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Meningkatnya perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	%	$\frac{\text{Jumlah Rutilahu yang ditangani}}{\text{Jumlah Rutilahu di LB}} \times 100\%$	Dinas PUPR dan Dinas Sosial	15,28	25,93	36,66	47,40	58,13	
		Persentase Perumahan Layak huni	%	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah di LB}} \times 100\%$	Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan	92,30	93,27	94,25	95,22	96,20	
5.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	Kualitas udara, Air dan tanah di titik pantau yang memenuhi baku mutu / Jumlah titik kualitas yang dipantau	Dinas Lingkungan Hidup	60,35	61,28	62,98	63,57	64,12	
5.	Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukan	Persentase ketaatan RTRW	%	$\frac{\text{Luas Lahan sesuai Peruntukan}}{\text{Luas Wilayah LB}} \times 100\%$	Dinas PUPR, Bappeda, Satpol PP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7.	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Persentase desa tangguh bencana	%	$\frac{\text{Jumlah Desa Tangguh Bencana}}{\text{Jumlah Desa di LB}} \times 100\%$	BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas PMP	4,41	8,82	13,23	17,64	22,05	
		Responttime tanggap bencana	Jam	Lama Waktu yang dibutuhkan Satgas Bencana dalam memberikan Pertolongan atau Penanganan	BPBD, dinas sosial, Satpol PP	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	

OPD | KABAG HUKUM

Misi II: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing.

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET					KETERANGAN / KRITERIA
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Barat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	Hasil Perhitungan Badan Pusat Statistik	Dinas Kesehatan, RSUD AU	66,94	67,24	67,54	67,84	68,14	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
		Angka Kematian Ibu (Per 10.000 Kelahiran Hidup)	Poin	$\frac{\text{Jumlah Ibu Hamil yg Meninggal}}{\text{jumlah Kelahiran Hidup}} \times 100.000$	Dinas Kesehatan, RSUD AU	149	139	130	121	110	Cakupan penurunan jumlah kematian ibu karena kehamilan sesuai UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Poin	$\frac{\text{D0} - \leq 1\text{th}}{\text{Jumlah Lahir Hidup}} \times 1000$	Dinas Kesehatan, RSUD AU	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9	D0-≤1th = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu. ΣLahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.
		Persentase Kasus Gizi Buruk yang ditangani)	%	$\frac{\text{Jumlah Kasus yang ditangani}}{\text{jumlah Kasus Gizi Buruk}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan, RSUD AU	100	100	100	100	100	Hasil penghitungan menggunakan kriteria pengukuran status gizi balita sesuai Permenkes No.23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizin
9.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK):									
		- SD	%	$APK\,th\,(SD) = \frac{E\,th}{2a} \times 100$	Pendidikan dan Kebudayaan	111,84	111,87	111,89	111,91	111,93	h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun E th = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan h Ph ta = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h
		- SMP	%	$APK\,th\,(SMP) = \frac{E\,th}{2a} \times 100$	Pendidikan dan Kebudayaan	99,33	99,53	99,73	99,93	99,95	

OPD | KABAG HUKUM

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET					KETERANGAN / KRITERIA
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Angka Partisipasi Murni (APM):									
		- SD	%	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7 – 12 Tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 Tahun}} \times 100\%$	Pendidikan dan Kebudayaan	100	100	100	100	100	
		- SMP	%	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13 – 15 Tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 Tahun}} \times 100$	Pendidikan dan Kebudayaan	91,82	91,87	91,89	91,94	91,99	
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7,30	7,35	7,37	7,42	7,44	
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	$HLS = FK \times \sum_{i=a}^{n} \left(\frac{E\,ti}{P\,ti} \right)$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12,27	12,29	12,31	12,33	12,35	HLS = Harapan Lama Sekolah E ti = Jumlah Penduduk Usia I yg bersekolah pada tahun t P ti = Jumlah Penduduk Usia I pada tahun t i = Usia (a, a+1...,n) FK = Faktor Koreksi Pesantren
		Angka Melanjutkan Sekolah	Tahun	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang sebelumnya}} \times 1$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	90,35	90,6	90,75	90,83	90,85	
		Nilai rata Ujian Nasional (UN):									
		- SD	Point	$\frac{\text{Jumlah rata2 nilai UN tiap SD}}{\text{Jumlah SD di LBa}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	209,95	210,01	210,11	210,21	210,31	
		- SMP	Point	$\frac{\text{Jumlah rata2 nilai UN tiap SMP}}{\text{Jumlah SMP di LBa}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	235,91	236,01	236,11	236,21	236,31	
		Indeks Baca Masyarakat	Point	Hasil Survei tentang Indeks Baca Masyarakat	Dinas Perpustaka dan Kearsipan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31	37	43	49	55	



No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET					KETERANGAN / KRITERIA
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	Hasil Perhitungan Badan Pusat Statistik	Seluruh OPD (Bappeda)	20.917.404	22.831.750	25.140.278	27.561.087	30.215.398	
11.	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah medali yang diperoleh pada event olahrega	Medali	Jumlah medali yang diperoleh pada event olahraga dalam 1 tahun anggaran	Dinas Pora Pariwisata	40	55	60	180	75	
12.	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Pemuda Aktif}}{\text{Jumlah Organisasi Pemuda di LB}} \times 100\%$	Dinas Pora Pariwisatan	70	73	77	80	83	
		Persentase wirausaha muda	%	$\frac{\text{Jumlah Pemuda yg berwirausaha}}{\text{jumlah Pemuda di LB}} \times 100\%$	Dinas Pora Pariwisata; dinas Koperasi UKM	30	35	40	45	50	
13.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	$r = ((Pt\,P0)^{x(1\,t)} - 1)x100$ $Pt = Po - (B - D) - (Mi - Mo)$	Dinas PPKBPPPA	1.16	1.14	1.12	1.02	0.96	r = laju pertumbuhan penduduk Pt = Jumlah penduduk pada tahun t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar t = selisih tahun Pt dengan P0 Pt = Jumlah penduduk pada tahun ke t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar (0) B (birth) = Jumlah kelahiran selama periode 0 - t D (death) = Jumlah Kematian selama periode 0 - t Mo = Jumlah migrasi keluar selama periode 0 - t Mi = Jumlah migrasi masuk selama periode 0 – t

OPD | KASAG HUKUM

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET					KETERANGAN / KRITERIA
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	$TFR = 5\sum_{i=0}^{n} ASFR\,i7i = 1$ $ASFR = bi\ pi fxK$	Dinas PPKBPPPA	2.51	2.44	2.38	2.27	2.26	TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur I pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok umur 45-49 K = bilangan konstanta biasanya 1000



Misi III: Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan agro-wisata berbasis sumberdaya lokal

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET					KETERANGAN / KRITERIA
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	Juta Rupiah	Jumlah Rata-rata Pendapatan Bruto yang dihasilkan pada subsector Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian dalam 1 Tahun.	Dinas TPH, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan dan Peternakan	2.985.690	3.197.847	3.410.004	3.622.160	3.834.317	
15.	Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor Perikanan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor Perikanan)	Juta Rupiah	Jumlah Rata-rata Pendapatan Bruto yang dihasilkan pada subsector Perikanan dalam 1 Tahun	Dinas Perikanan	137.058	150.202	164.606	180.392	197.691	
16.	Meningkatnya Pertumbuhan industri Sektor Pariwisata	Rata rata Lama Tinggal	Hari	Rata-rata lama wisatawan tinggal/menetap dalam 1 tahun	Dinas Pora Pariwisata	1,5	2	2	2,5	3	
		Jumlah Kunjungan Wisatawan)	Orang	Jumlah Kunjungan Wisatawan dalam 1 tahun.	Dinas Pora Pariwisata	16.778	17.114	17.456	17.805	18.161	
		Rata rata Jumlah Pengeluaran Wisatawan	Rupiah	Rata rata Jumlah Pengeluaran Wisatawan yg ke Lampung Barat dalam 1 tahun	Dinas Pora Pariwisata	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	
17.	Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri dan perdagangan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri	Juta Rupiah	Jumlah Rata-rata Pendapatan Bruto yang dihasilkan pada Sektor Industri dalam 1 Tahun.	Dinas Koperindag, Sekretariat Daerah	247.694	250.171	252.673	255.200	257.751	
		Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Perdagangan	Juta Rupiah	Jumlah Rata-rata Pendapatan Bruto yang dihasilkan pada Sektor Perdagangan dalam 1 Tahun.	Dinas Koperindag, Sekretariat Daerah	649.586	656.081	662.642	669.269	675.961	
18.	Meningkatnya nilai Investasi	Nilai Investasi	Rupiah	Jumlah Nilai Investasi (PMDN dan PMA) dalam 1 tahun.	Dinas PMPTSPNaker	3.325.564 .458	3.491.842 .681	3.666.434 .815	3.849.756 .556	4.042.244 .384	

OPD | KABAG HUKUM

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET					KETERANGAN / KRITERIA
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	Meningkatkan kontribusi dan daya saing koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam perekonomian daerah	Jumlah Koperasi yang Aktif	Unit	Jumlah Koperasi Aktif di LB	Dinas Koperasi UKM	26	30	34	38	42	Koperasi dikatakan aktif adalah koperasi yang selalu melakukan Rapat Anggota tahunan (RAT) atau minimal melakukan RAT setahun sekali sesuai UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian
		Tingkat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	%	$\frac{\text{Jumlah UKM th ini} - \text{th sebelumnya}}{\text{jumlah UKM th sebelumnya}} \times 100$	Dinas Koperasi UKMn	2	4	6	8	10	

OPD | KASAG HUKUM

Misi IV: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET					KETERANGAN / KRITERIA
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten lampung Barat	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	Nilai Hasil Evaluasi RB	Seluruh OPD (Sekretariat Daerah)	-	C	C	C	C	Nilai dan Predikat RB : NO / NILAI HASIL EVALUASI / PREDIKAT 1 / 90 - 100 / AA 2 / 80 - 90 / A 3 / 70 - 80 / BB 4 / 60 - 70 / B 5 / 50 - 60 / CC 6 / 30 - 50 / C 7 / < 30 / D
21.	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)i	Predikat	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	Seluruh OPD (Bappeda, Sekretariat Daerah dan Inspektorat)	B	BB	BB	BB	BB	Nilai dan Predikat SAKIP : NO / NILAI HASIL EVALUASI / PREDIKAT 1 / 90 - 100 / AA 2 / 80 - 90 / A 3 / 70 - 80 / BB 4 / 60 - 70 / B 5 / 50 - 60 / CC 6 / 30 - 50 / C 7 / < 30 / D
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Predikat Opini	Hasil Evaluasi BPK RI	Seluruh OPD (BPKD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
22.	Meningkatnya kualitas layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	Jumlah OPD Pelayanan dengan IKM 75 atau lebih dibandingkan dengan Seluruh OPD Pelayanan	Seluruh OPD Pelayanan (Sekretariat Daerah)	-	C	C	C	C	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung melalui survey selama satu tahun yang diikuti minimal 50% penerima layanan terhadap 14 (empat belas) variable unsur pelayanan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004

OPD | KABAG HUKUM

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET					KETERANGAN / KRITERIA
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut : 1. Kesesuaian biaya 2. Kesesuaian/ketepatan waktu 3. Kemudahan prosedur pelayanan 4. Kemampuan petugas pelayanan 5. Kesopanan dan keramahan petugas 6. Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan 7. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis perizinannya 8. Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani 9. Kedisiplinan petugas pelayanan 10. Tanggung jawab petugas pelayanan 11. Kecepatan pelayanan 12. Keadilan untuk mendapatkan pelayanan 13. Kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan 14. Keamanan pelayanan

OPD | KABAG HUKUM

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET					KETERANGAN / KRITERIA
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan	Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Predikat	Skor Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Seluruh OPD (Sekretariat Daerah)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Nilai LPPD berdasarkan Indeks EKPPD : No. / Indeks EKPPD / Prestasi 1 ,00<.....≤4,00 Sangat Tinggi 2 2,00<.....≤3,00 Tinggi 3 1,00<.....≤2,00 Sedang 4 0,00<.....≤1.00 Rendah
24.	Menurunnya desa tertinggal	Persentase Desa Tertinggal	%	$\frac{\text{Jumlah Desa Tertinggal}}{\text{jumlah Desa di LB}} \times 100\%$	Seluruh OPD (Dinas PMP)	19,84	9,92	0	0	0	Perhitungan persentase desa tertinggal adalah untuk mengukur dan mengetahui cakupan desa tertinggal yang masih ada di Kab.LB dalam rangka untuk melepaskan Kab. LB dari predikat daerah tertinggal menurut Perpres No.131 Tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal 2015-2019.

OPD | KABAG HUKUM

Misi V: Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET					KETERANGAN / KRITERIA
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	Meningkatnya keamanan dikalangan masyarakat	Persentase angka kriminalitas yang terselesaikan	%	$\frac{\text{Kasus Kriminalitas terselesaikan dalam 1 th}}{\text{Jumlah Kasus Krtiminalists dalam 1 th}} \times 100$	Satpol PP, Kesbangpol	100	100	100	100	100	
26.	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib	Persentase konflik SARA yang terselesaikani	%	$\frac{\text{Jumlah Konflik yg terselesaikan}}{\text{Jumlah Konflik dalam 5 tahun}} \times 100\%$	Satpol PP, Kesbangpol, Sekretariat Daerah)	100	100	100	100	100	
		Persentase kasus Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3) yang terselesaikan	%	$\frac{\text{Jumlah Kasus K5 yg terselesaikan}}{\text{Jumlah Kasus K5 dalam 5 tahun}} \times 100\%$	Satpol PP, Kesbangpol	100	100	100	100	100	
27.	Menurunnya kasus kekerasan kepada perempuan dan anak	Persentase Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani	%	$\frac{\text{Jumlah Kasus KDRT yang ditangani}}{\text{Jumlah Kasus KDRT dalam 1 tahun}} \times 100\%$	Dinas PPKBPPPA	100	100	100	100	100	
28.	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Poin	$IPG = \frac{1}{3}((Xede(1) + X\ ede(2) + Iinc - dis$	Dinas PPKBPPPA	91.60	91.64	91.70	91.74	91.80	Xede(1)= Xede untuk harapan hidup Xede(2)= Xede untuk harapan pendidikan Iinc-dsi = indeks distribusi pendapatan Variabel untuk menyusun indikator ini diperoleh juga dari Sakernas, SUPAS dan Sensus Penduduk. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan

OPD | KABAG HUKUM

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET					KETERANGAN / KRITERIA
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	Hasil survey tentang persentase perempuan disuatu wilayah (dalam hal ini Kabupaten Lampung Barat) yang berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan politik.	Dinas PPKBPPPA	50.2	51.2	52.2	53.2	54.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.
29.	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas TPH, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perikanan	88,4	89,1	90	91,1	92,4	Pola pangan harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Dalam menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi. Dengan pendekatan Pola Pangan Harapan dapat dinilai mutu pangan penduduk berdasarkan skor pangan (*dietary score*). Semakin tinggi skor mutu pangan, menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya

OPD | KABAG HUKUM

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET					KETERANGAN / KRITERIA
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	Meningkatnya ketahanan pangan	Angka Kemiskinan	%	Hasil Perhitungan Badan Pusat Statistik	Dinas Sosial, Dinas Koperindag, Bappeda	14	13,75	13	12,50	12	Definisi kemiskinan absolut menurut Bank Dunia dapat diartikan, hidup dengan pendapatan di bawah USD $1 per hari. Sementara kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah $2 per hari Kriteria Miskin berdasarkan BPS, seseorang dikategorikan miskin kalau memenuhi minimal 9 kriteria dari 14 kriteria sbb: 1. Luas lantai bangunantempat tinggal kurang dari 8m2 per orang; 2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan; 3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester; 4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersamasama dengan rumah tangga lain; 5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik; 6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan; 7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/minyak tanah 8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu; 9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; 10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari; 11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik; 12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan 13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/tamat SD;

OPD | KASAG HUKUM

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET					KETERANGAN / KRITERIA
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya; *Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dikategorikan miskin*
		Indeks Gini	Poin	$G = 1 + \sum_{i=1}^{k} Pi(Q1 + Qi - 1)$	Bappeda	0,34	0,32	0,3	0,28	0,26	Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-I Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 Ketimpangan rendah 0,3 < G < 0,5 Ketimpangan sedang G . 0,5 Ketimpangan tinggi
31.	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia AK}}{\text{jumlah Penduduk AK}} \times 100\%$	Dinas PMPTSP Naker, Dinas Pora Pariwisata Dinas Koperasi UKM	0,90 1 0 0	0,85	0,80	0,75	0,71	

OPD | KABAG HUKUM

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET					KETERANGAN / KRITERIA
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani (Person)	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertanganK}}{\text{jumlah PMK}} \times 100\%$	Dinas Sosial	20	40	60	80	100	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Bappeda	
5	Badan Pemberdayaan	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	